

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1998 ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang hampir seluruh sektor perekonomian di Indonesia lumpuh, perbankan mengalami kebangkrutan karena kredit macet sebesar 30%, pertumbuhan ekonomi yang merosot hingga -13,%, rupiah terdevaluasi sampai 90%, inflasi mencapai 78% dan harga makanan melambung hingga 118% serta lebih dari 70% perusahaan yang tercatat dipasar modal mengalami kebangkrutan dan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan kurang lebih 20 juta pekerja kehilangan pekerjaan sehingga melonjakkan angka pengangguran, disaat genting tersebut Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdiri kokoh, bertahan dari terpaan krisis moneter sehingga UMKM diakui oleh Menteri Keuangan pada saat itu sebagai penyelamat bagi perekonomian Indonesia yang diterjang krisis moneter (Tatik, 2018).

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa karena memegang peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja serta menjadi penopang saat terjadinya guncangan krisis ekonomi di Indonesia (Ningtyas:2017). Akan tetapi seiring dengan pentingnya peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, ada saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan usahanya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi,

serta kendala penyusunan laporan keuangan (Muchid, 2012). Hal ini juga didukung oleh pendapat Zimmerer dan Scarborough dalam Magfirah & BZ (2016) yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya, kurangnya pengalaman manajemen, dan kurang stabilnya keuangan akan mengakibatkan tingkat kematian bisnis mikro maupun kecil jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis yang sudah lebih besar.

Terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Barus, Indrawaty & Solihin (2018) mencoba melihat implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah di UMKM Borneo Food Truck Samarinda Community dan menemukan bahwa kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan adalah karena kurangnya pengetahuan tentang standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dan sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang menyelenggarakan pencatatan akuntansi UMKM sehingga mengakibatkan pencatatan akuntansi hanya dibuat secara sederhana. Selain itu, fokus pelaku UMKM hanya kepada peningkatan penjualan dan belum terfokus pada pencatatan yang lebih akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barus *et al.*, 2018 yang hanya melihat implementasi SAK EMKM pada UMKM, penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sektor ritel barang harian, apakah sudah

sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM atau belum. Penelitian ini hanya berfokus pada usaha mikro dan kecil sektor ritel barang harian yang ada di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto karena mengingat jenis UMKM yang paling banyak di daerah ini dan memenuhi kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 hanya jenis usaha mikro dan kecil. Sementara untuk usaha menengah belum ditemukan yang sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang Undang tersebut. Penelitian ini dilakukan karena mengingat peran persediaan yang begitu vital dalam operasional sebuah perusahaan terutama dalam usaha mikro & kecil yang belum dituntut untuk membuat laporan keuangan yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu sehingga pencatatan yang sederhana di usaha mikro & kecil masih dapat diterima. Akan tetapi pengelolaan persediaan harus selalu diperhatikan karena persediaan merupakan penopang bagi usaha mikro & kecil serta merupakan sumber perolehan kas utama bagi jenis usaha tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Prempeh (2015) yang menyatakan bahwa persediaan merupakan sumber utama pendapatan sehingga pengelolaan persediaan yang baik akan memberikan *profit* bagi perusahaan.

Persediaan harus dimiliki karena merupakan produk perusahaan yang harus dijual sebagai sumber pendapatan. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Karena itu persediaan harus dikelola dengan baik agar perusahaan dapat menjual produknya serta memperoleh pendapatan

sehingga tujuan perusahaan tercapai (Rudianto, 2012:222). Perusahaan memperoleh kas dari aktivitas penjualan persediaan, jika persediaan terjual dengan cepat maka perolehan kas juga akan semakin cepat dan lancar. Barchelino (2016) menyatakan bahwa semua aktivitas operasional perusahaan memprioritaskan pada usaha untuk melikuidasi persediaan menjadi kas. Perusahaan yang dapat mengendalikan sistem persediaannya dengan tepat akan memudahkan perusahaan untuk bertahan dalam kegiatan operasional dan menjaga kelancaran operasi perusahaan. Untuk itu persediaan barang menjadi hal yang penting, sebab sukses tidaknya perencanaan dan pengawasan persediaan akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan, salah satunya pada penentuan keuntungan perusahaan. Perusahaan senantiasa memberi perhatian yang besar pada persediaan karena tanpa persediaan, para pengusaha akan menghadapi resiko perusahaannya pada suatu waktu tidak lagi dapat memenuhi permintaan pelanggan (Nurlaila, 2017). Sehingga persediaan memiliki peranan yang sangat besar bagi kelangsungan usaha sebuah perusahaan baik usaha skala besar, menengah atau bahkan usaha kecil.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu jenis usaha di Indonesia juga memiliki persediaan yang harus dijual dan dikelola dengan baik agar mendatangkan keuntungan. Sehingga pengelolaan persediaan pada UMKM juga harus diperhatikan. Sharma (2010) mengatakan bahwa pengelolaan persediaan sangat penting dalam pengelolaan operasional. Namun yang menjadi permasalahan bagi para

pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kurangnya pengetahuan tentang *inventory management* atau pengelolaan persediaan yang baik. Standar mengenai persediaan diatur dalam PSAK No 14 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, selain itu persediaan juga diatur dalam SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Bab 11 yang disahkan pada 19 Mei 2009. Setelah itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia menyadari bahwa keberadaan entitas mikro, kecil dan menengah di Indonesia adalah pondasi utama perekonomian, sehingga pengaturan dalam tatanan standar yang secara biaya tidak terlalu mahal dan secara manfaat tepat guna diperlukan untuk membantu entitas tersebut berkembang dimulai dengan kesadaran mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan, sehingga diterbitkanlah SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) yang disahkan per 24 Oktober 2016 dan mulai efektif pada 1 Januari 2018. Dalam SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah) Bab 9 hal 21 dijelaskan mengenai ruang lingkup, pengakuan dan pengukuran serta penyajian persediaan untuk UMKM. Akan tetapi, banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum memahami standar atau pedoman tersebut yang kemudian berimbas pada tidak diterapkannya standar tersebut pada usaha mereka. Sehingga masih banyak ditemukan para pelaku usaha yang harus menderita kerugian akibat banyaknya beban yang timbul dari persediaan, misalnya beban kerusakan persediaan akibat tidak terjual dan habis masa layak pakainya (*expired*). Hal ini disebabkan oleh

masih kurangnya pengetahuan tentang *inventory management* yang baik dan benar sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan SAK EMKM Persediaan pada Usaha Mikro & Kecil Sektor Ritel Barang Harian di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah Apakah usaha mikro & kecil sektor ritel barang harian di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil & Menengah tentang Persediaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAK EMKM persediaan pada pelaku usaha mikro sektor ritel barang harian di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya tentang akuntansi persediaan SAK EMKM persediaan bagi UMKM, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis dan relevan dimasa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi para pelaku usaha mikro sektor ritel barang harian di Kelurahan Dutulanaa agar dapat menerapkan SAK EMKM mengenai pengelolaan persediaan.